

JOKOWI DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA JOKOWI

Florante Marjo Metkono¹, Georgius Locang²
marjoflorante@gmail.com¹, ruslilocang@gmail.com²
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Jokowi merupakan presiden Indonesia yang menjabat selama dua periode dari tahun 2014-2024. Selama masa jabatannya, banyak program yang dijalankan di bawah kepemimpinannya. Namun, sangat disayangkan demokrasi Indonesia berdasarkan penilaian Indeks Demokrasi (ID) mengalami kemerosotan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan demokrasi di era Jokowi dengan menggunakan pendekatan teori dan indikator kualitas demokrasi. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pemerintahan Jokowi lebih menitikberatkan pada pembangunan struktural dengan mengutamakan kepentingan pribadinya dan kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah justru mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Akibatnya, berbagai hal yang bersifat demokratis seperti persamaan, kebebasan, dan lain-lain terlucuti. Oleh karena itu, penghilangan campur tangan elit-oligarki dalam kehidupan negara demokrasi harus dihilangkan. Pengujian etika dan intelektual bagi calon wakil rakyat harus dilakukan.

Kata Kunci: Jokowi, Kemunduran Demokrasi, Dan Implementasi Demokrasi.

ABSTRACT

Jokowi is a president of Indonesia who served for two terms from 2014-2024. During his term, many programs were carried out under his leadership. However, it is unfortunate that Indonesian democracy based on the Democracy Index (ID) assessment has declined. This study explores the implementation of democracy in the Jokowi era using a theoretical approach and indicators of the quality of democracy. From the results of the study, the author found that the Jokowi government focused more on structural development with his personal interests and the interests of certain groups. The government actually ignored the basic principles of democracy. As a result, various things that are democratic such as equality, freedom, and others were stripped. Therefore, the elimination of elite-oligarchic interference in the life of a democratic state must be eliminated. Testing of ethics and intellectuals for prospective people's representatives must be carried out

Keywords : Jokowi, Democracy Decline, And Implementation Of Democracy.

PENDAHULUAN

Fakta bahwa kualitas demokrasi saat era kepemimpinan Jokowi di Indonesia mengalami kemunduran adalah hal yang tidak dapat di sangkal. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2019-2023 dinyatakan turun dari skor 62 poin ke 53 poin. Pada tahun 2021, Wasisto Raharjo Jati melakukan kajian mengenai kualitas demokrasi di Indonesia dan menemukan adanya fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia. Fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia ia simpulkan setelah melihat tiga laporan utama yakni 2020 The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report. Pasalnya, menurunnya demokrasi di Indonesia disebabkan oleh adanya peran militer yang lebih besar dalam urusan politik, adanya sentimen polarisasi, dan terbangunnya dinasti politik.

Kritik dari berbagai pihak terhadap sistem demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran di era kepemimpinan Jokowi terus berlanjut. Namun, di sisi lain ada pula yang mengapresiasi segala pencapaian di bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Satu harapan bahwa semoga di era kepemimpinan Prabowo demokrasi di Indonesia bisa mengalami kemajuan. Kemajuan yang dimaksud ialah pemimpin yang baru ini mampu

menjadi sosok pemimpin yang lebih efektif. Pemimpin yang lebih efektif adalah pemimpin yang fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Semboyan klasik demokrasi yakni pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, perlu diimplementasikan dengan baik. Akibat dari kurangnya implementasi demokrasi dengan baik rakyat mengalami krisis identitas. Krisis identitas yang dimaksud yakni hak-hak yang seharusnya diperoleh justru dibatasi. Meskipun, di satu sisi rakyat diberi kebebasan dalam bersuara dan berorasi melalui demo, diskusi dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain kebebasan tersebut hanya sebatas formalitas, sebab faktanya suara rakyat hanya seperti gaung gendang yang berbunyi namun tak didengarkan. Lalu apakah artinya jika rakyat diabaikan? Apa artinya demokrasi jika bentuk implementasi demokrasi hanya sebatas kepentingan individu dan kelompok tertentu?

Setiap pemerintah dalam masa jabatannya memiliki kinerjanya tersendiri, begitu juga dengan kepemimpinan era Jokowi. Bentuk implementasi demokrasi yang dibuat oleh setiap era pemerintah berbeda-beda. Kajian tentang bentuk implementasi demokrasi memikat banyak pakar dan menjadi subjek yang intersif dalam diskusi akademis. Fenomena ini ditunjang oleh sejumlah penelitian yang menyoroiti berbagai ketimpangan yang masih terjadi dalam praktik demokrasi, seperti konflik yang timbul antara masyarakat dan pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta adanya berbagai bentuk ketidakmurnian dalam implementasi demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meramu tulisan ini di bawah pertanyaan mendasar “Bagaimana implementasi demokrasi di era Jokowi sebagai cikal bakal kemunduran demokrasi Indonesia?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengeksplorasi bentuk implementasi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi dan kemunduran demokrasi. Kajian dalam artikel ini akan menggunakan pendekatan teoritis yang bersumber dari studi literatur atau tinjauan literatur. Studi Literatur diambil untuk mencari sumber referensi dengan kajian kepustakaan. Artinya, penulis berusaha untuk meramu tulisan dengan terus mengolah literatur-literatur, baik melalui buku-buku, surat kabar, artikel-artikel dalam jurnal, skripsi, tesis maupun melalui internet dan lain sebagainya untuk memperkaya tulisannya.. Sementara itu, kajian artikel ini didasarkan pada teori demokrasi model individualisme liberaral, model pancasila, pluralis, dan sosialis, dengan beberapa indikator penilaian kualitas demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Demokrasi

Dalam konteks pembahasan tentang kemunduran demokrasi Indonesia era kepemimpinan Jokowi, perlu untuk memahami terlebih dahulu konsep demokrasi. Demokrasi itu sendiri bukanlah hal yang baru bagi kita. Ironisnya, praktik mengenai keberlakuan demokrasi mengalami kemunduran. Hemat penulis, pemaknaan akan nilai-nilai demokrasi diabaikan, sehingga kebijakan-kebijakan dalam mengatur negara tidak sesuai harapan bersama. Demokrasi itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintah. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat atau rakyat memegang peranan yang sangat menentukan dalam pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti rakyat memiliki kekuatan atau kedaulatan dipengang oleh rakyat dalam suatu pemerintahan. Pengertian secara etimologis ini, menggaris bawahi pentingnya peranan dan partisipasi rakyat. Konsep

demokrasi seperti ini dimaknai oleh Abraham Lincoln sebagai *government of, by, and for the people*. Makna ini kemudian menjadi semboyan yang dikenal di semua kalangan.

Konsep demokrasi yang awalnya lahir dari akar zaman Yunani kuno, telah mengalami perkembangan selamat berabad-abad. Perkembangan demokrasi ini dipengaruhi oleh berbagai ideologi filsafat. Ideologi-ideologi tersebut di antaranya liberalisme, konservatisme, sosialisme, dan anarkisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi filsafat yang lebih menekankan hak individu, kesetaraan, dan perlindungan kebebasan pribadi. Pengaruhnya bagi demokrasi melahirkan prinsip-prinsip demokrasi seperti perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan pemerintahan berdasarkan hukum. Konservatisme adalah ideologi filsafat yang mendukung dan melestarikan nilai-nilai tradisional. Pengaruhnya terhadap demokrasi ialah dengan advokasi agar selalu mempertahankan struktur sosial dan politik yang sudah mapan. Sosialisme adalah ideologi filsafat yang mengadopsi prinsip kesetaraan dalam egalitarianisme. Ideologi ini mempengaruhi demokrasi dengan memperjuangkan hak-hak sipil, sosial, dan politik. Anarkisme adalah sebuah ideologi yang hidup dalam pandangan masyarakat tanpa negara. Pengaruhnya terhadap demokrasi ialah membentuk pusat tata kelola dan partisipatif. Semua ideologi ini mempengaruhi perkembangan demokrasi hingga saat ini.

Indonesia menggunakan konsep demokrasi dalam bentuk pemerintahannya, sehingga bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi. Rakyat memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Wujud dari bentuk pemerintahan demokrasi di Indonesia termaktub dalam tiga lembaga utama yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah wujud pemerintahan “dari rakyat” dan rakyat menjadi kekuatan. Lembaga eksekutif adalah wujud dari pemerintahan “oleh rakyat” yang menjalankan berbagai kehendak rakyat. Lembaga yudikatif adalah wujud dari pemerintahan “untuk rakyat” yang fungsinya untuk menegakan keadilan dan hukum bagi kesejahteraan rakyat. Ketiga lembaga ini melakukan *check and balances* yakni saling mengawasi, menyeimbangkan dan mengawasi penyalagunaan kekuasaan.

Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terbentuk dalam suatu dekade pemerintahan dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk membentuk pemerintah yang efektif dan demokratis. Terbentuknya lembaga-lembaga kerakyatan di Indonesia terjadi melalui mekanisme pemilihan umum, yang merupakan ciri khas demokrasi. Pemilihan umum dimaknai dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam memilih pemimpin mereka. Makna demokrasi tercapai apabila pemilihan umum yang diselenggarakan terjadi secara transparan dan akuntabel, serta melalui *check and balances* yang baik. Namun, apabila nuansa demokratis dilihat sebatas pemilihan umum, maka makna demokrasi mengalami pengesempitan.

Demokrasi juga dimaknai dalam prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut yang menjadikan demokrasi lebih bernilai. Ada banyak sekali prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun negara yang demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut misalnya adanya pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya hukum/Undang-Undang yang mengatur, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, adanya pers yang bebas dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip demokrasi seperti ini dapat diimplementasikan dalam lapangan

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa jalannya demokrasi tidak dapat berlangsung dengan baik. Misalnya, adanya pasang-surut demokrasi di Amerika Serikat yang ditandai dengan adanya perubahan konstitusional, gerakan memperluas partisipasi politik, maupun adanya jaminan hak-hak sipil bagi semua warga negaranya. Proses seperti ini menjadi tantangan dalam sebuah negara demokrasi yang bercita-cita untuk menjadikan

demokrasi lebih inklusif. Hal yang sama pula terjadi dalam praktik demokrasi di Indonesia. Dalam praktik demokrasi di Indonesia bentuk implementasi mengenai prinsip-prinsip demokrasi mengalami bermacam-macam tantangan, seperti adanya konflik kepentingan politik, korupsi, lemahnya partisipasi masyarakat, maupun kurangnya pemenuhan hak asasi manusia. Tantangan seperti tantangan seperti ini apabila tidak diatasi dengan baik akan menurunkan kualitas demokrasi. Lalu seperti apakah implementasi demokrasi yang dilakukan di era kepemimpinan Jokowi?

Indikator Kualitas Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ideal di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Namun, menilai kualitas demokrasi di suatu negara, seperti Indonesia, membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan idealis. Dalam memahami seberapa baik demokrasi berjalan, kita perlu melihat berbagai indikator yang menunjukkan praktik dan hasil dari sistem tersebut. Penulis dalam tulisan ini memilih beberapa indikator yang bisa menilai kualitas demokrasi. Pertama: partisipasi politik. Partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga secara aktif dan sukarela dalam proses politik seperti dalam mempengaruhi kebijakan politik, bisa dilakukan kampanye, menyumbangkan suara, lobby politik, atau melalui diskusi politik. Dalam indikator ini kita dapat menilai; 1) Seberapa aktif masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum? Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin mereka. 2) Apakah masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut diintimidasi atau dipenjara? Dalam hal ini adanya penilaian akan kebebasan berpendapat dan berekspresi. 3) Apakah media massa dapat menjalankan tugasnya secara independen dan kritis? (penilaian mengenai kebebasan pers). Pers bebas berperan penting dalam mengawasi pemerintah dan menginformasikan publik.

Kedua: Hak Asasi Manusia. Dalam demokrasi penjuang terhadap nilai Hak Asasi Manusia tidak terbatas, sehingga tidak salah apabila Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai indikator dalam menilai suatu demokrasi. Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut dengan istilah human rights adalah hak-hak universal yang melekat dalam diri seorang individu karena hakikat dan kondratnya memang sebagai seorang manusia. Indikator ini digunakan untuk menilai; 1) mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia: Apakah hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan keadilan dijamin dan dilindungi?; 2) Kebebasan agama dan kepercayaan: Apakah masyarakat bebas untuk menjalankan agamanya tanpa diskriminasi?; 3) Keadilan dan kesetaraan: Apakah hukum diterapkan secara adil dan setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang?

Ketiga, Lembaga Demokrasi. Lembaga demokrasi adalah suatu lembaga yang lebih menjunjung tinggi kepentingan bersama dan siap menerima kritik dan saran dari luar. Lembaga-lembaga demokrasi misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPK), BAWASLU dan lain sebagainya. Berbagai macam lembaga tersebut berada dalam tiga lembaga utama yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demokrasi dapat berlangsung dengan baik apabila semua lembaga ini berfungsi dengan baik. Kualitas demokrasi dapat kita nilai dengan melihat apakah lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik?, apakah lembaga legislatif dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah dan pengusul kebijakan secara efektif? apakah lembaga eksekutif dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab kepada rakyat?.

Keempat, proses politik. Dalam politik, proses ditandai dengan jalannya politik yang terjadi dalam suatu negara. Dalam demokrasi indikator ini bisa digunakan untuk menilai adanya apakah transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, apakah adanya kebebasan partai politik dalam menjalankan fungsinya, dan untuk menilai sistem pemilihan umum

yang adil, bebas, dan demokratis.

Kelima, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh UNDP untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia. IDI mengukur tiga aspek utama: proses politik, hak sipil dan kebebasan politik, dan budaya politik. IDI memberikan skor untuk setiap aspek, dan skor total menunjukkan tingkat demokrasi di Indonesia.

Teori-Teori Demokrasi

Setelah membahas indikator kualitas demokrasi, penting untuk memahami bagaimana teori-teori demokrasi menjelaskan dan menginterpretasikan konsep ini. Berbagai teori menawarkan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan, dan apa yang menjadi tujuan utamanya. Memahami teori-teori ini membantu kita untuk melihat bagaimana kualitas demokrasi dapat diukur dan ditingkatkan. Hemat penulis ada beberapa model teori demokrasi yang masih relevan untuk membahas mengenai situasi demokrasi di Indonesia saat ini. Model-model teori demokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Model Individualisme Liberal

Teori demokrasi model individualisme liberal adalah model teori demokrasi yang menjelaskan demokrasi sebagai pelindung rakyat dari ancaman dan gangguan atau kesewenang-wenangan pemerintah, serta menginginkan universal maupun kesamaan dalam proses politik atau sering disebut *one man one vote*. Teori ini menekankan pada hak-hak individu dan kebebasan personal sebagai dasar demokrasi. Masyarakat dianggap sebagai kumpulan individu yang memiliki hak dan kebebasan yang sama, dan negara memiliki peran untuk melindungi hak-hak tersebut. Model ini menekankan pada pemilihan umum sebagai mekanisme utama dalam demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka. Model ini terlihat relevan dengan Indonesia karena sistem politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan pemilihan umum sebagai instrumen utama. Namun, praktiknya, kebebasan individu dan hak asasi manusia masih sering terkendala, seperti terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap aktivis.

2) Model Pluralis

Teori demokrasi model ini adalah teori yang memandang demokrasi sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi untuk menyeimbangkan kelompok-kelompok yang bertentangan seperti para elit politik yang haus akan kekuasaan politik yang tidak sesuai dengan kehadak rakyat. Teori ini menekankan pada pluralitas dan keragaman dalam masyarakat. Model ini melihat demokrasi sebagai proses negosiasi dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam model ini, partisipasi politik dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Model ini relevan dengan kondisi demokrasi di Indonesia karena Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang tinggi. Namun, praktiknya, kekuatan kelompok tertentu seperti partai politik dan oligarki sering kali menguasai ruang publik dan membatasi partisipasi kelompok masyarakat lainnya.

3) Model Sosialis

Teori demokrasi model sosialis adalah teori demokrasi yang menekankan kesetaraan sosial dan ekonomi sebagai dasar demokrasi. Teori ini merupakan bentuk penolakan terhadap hubungan sosial dan ekonomi dalam pandangan individualisme liberal. Model ini melihat demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam model ini, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dan kontrol atas sumber daya ekonomi menjadi penting. Model ini relevan dengan kondisi demokrasi di Indonesia karena kesenjangan sosial dan ekonomi masih

menjadi masalah serius. Namun, praktiknya, sistem politik dan ekonomi di Indonesia masih didominasi oleh kelompok elit, yang membuat akses terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi tidak merata.

4) Model Pancasila

Model ini merupakan model demokrasi yang unik dan spesifik untuk Indonesia. Model ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Model ini berusaha untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai individualisme dan kolektivisme dalam masyarakat. Model ini relevan dengan kondisi demokrasi di Indonesia karena Pancasila merupakan dasar negara dan filosofi bangsa. Model ini bercorak nasionalisme religius. Namun, praktiknya, interpretasi Pancasila seringkali dipolitisasi dan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Analisis Kemunduran Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi

Semboyan yang kian melekat dari demokrasi ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ironisnya, dalam kepemimpinan Jokowi yang melebihi satu dekade ini, muncul berbagai asumsi publik mengenai pemaknaan dan realisasi akan demokrasi ini. Seperti apakah bentuk implementasi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi?. Jokowi adalah presiden ke 7 negara kesatuan Republik Indonesia yang menjabat selama dua periode. Periode pertama mulai 2014-2019 dengan pasangan Jusuf Kalla dan periode kedua mulai 2019-2024 dengan pasangan K.H. Ma'ruf Amin. Ketika menjabat sebagai presiden Indonesia sudah menjadi negara demokrasi. Kehidupan demokrasi negara Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. Awalnya, tahun 1945-1959 diberlakukan sistem demokrasi parlementer, kemudian tahun 1959-1965 sistem demokrasi diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965-1998 sistem demokrasi diubah menjadi sistem demokrasi pancasila era orde baru, dari situ perkembangan demokrasi pun berubah dan digunakan hingga sekarang yang disebut demokrasi reformasi tahun 1998. Hal itu berarti setelah 16 tahun dari masa reformasi barulah Jokowi menjadi presiden. Faktanya indeks demokrasi mengalami penurunan, walau pun di satu sisi pembangunan infrastruktur mengalami perkembangan.

Fakta seperti ini, di dukung dengan praktik demokrasi di era kepemimpinan Jokowi yang justru mengesampingkan makna kedaulatan rakyat. Jika kita bercermin maka kita akan melihat bayangan kita. Bayangan kita adalah hasil representasi dalam bentuk simbol. Secara otentik, demokrasi sebenarnya bukan kita bercermin lalu kita jatuh cinta kepada bayangan kita, tetapi demokrasi berarti kita bercermin dan bayangan kita mencintai kita. Dengan kata lain, pemimpin yang kita pilih untuk menduduki suatu jabatan merupakan hasil representasi bayangan kita, maka sudah semestinya mereka mencintai kita. Itulah makna sebenarnya dari kedaulatan rakyat. Namun, makna seperti ini sudah direkayasa dengan berbagai kepentingan pribadi, seperti adanya money politik, politik dinasti, atau banyaknya berita bohong. Hal seperti inilah yang mematahkan teori demokrasi model individualisme liberal. Akhirnya dalam partisipasi politik seperti pemilihan umum, rakyat dibagi dalam dua kubu yakni yang optimis tapi irasional dan yang pesimis tapi rasional. Kubu yang optimis tapi irasional adalah mereka yang cenderung gampang disogok dengan serangan fajar atau BLT dalam tanda kutip, sebab yang mereka pikir hanya “apa yang kita dapat sekarang” (pikiran jangka pendek), bukan pemikiran jangka panjang. Kubu yang pesimis tapi irasional adalah mereka yang cenderung kritis terhadap keadaan yang dihadapi. Adanya dua kubu seperti ini bisa membuat orang lebih memilih golput (golongan putih). Pada tahun 2004 presentase angka golput sekitar 26%, tahun 2009 sekitar 20%, tahun 2014 sekitar 25%, tahun 2019 sekitar 20%, dan tahun 2024 sekitar 20,8%, dengan faktor utama orang memilih golput ialah karena kurangnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini berarti pemerintah Jokowi

telah gagal membangun kepercayaan rakyat. Banyaknya golput berarti adanya penurunan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilih mereka, sehingga menjadi gangguan serius pada sistem demokrasi.

Kepemimpinan Jokowi yang diharapkan membuat demokrasi semakin lebih sehat justru melakukan sebaliknya. Awalnya roda pemerintahan Jokowi berjalan dengan baik dan menuai banyak pujian, tetapi di akhir kepemimpinannya justru meninggalkan kesan yang menuai banyak kritik. Beberapa aspek kunci yang sekiranya menjadikan pemerintah Jokowi harus menuai banyak kritik dan berimbas kepada kemunduran demokrasi ialah timbulnya praktik politik dinasti, politik cawe-cawe, politik banson, tidak ada penegakan hukum, dan adanya pengurangan kebebasan berekspresi. Prinsip dasar dalam demokrasi reformasi tahun 1998 yakni adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, menjamin hak-hak dasar warga negara, dan rekrutmen politik yang inklusif tidak lagi dijalankan dengan baik. Beberapa hal ini setidaknya bisa menjadi suatu estimasi dalam menilai kemunduran demokrasi di Indonesia.

Pemerintah Jokowi memang berhasil melancarkan pemilu dan pilkada, meningkatkan akses informasi dan partisipasi publik dalam bersuara, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPU, Bawaslu, maupun mahkamah konstitusi. Namun, pemilu masih dijadikan ajang untuk memperoleh kekuasaan, akses informasi masih dimanipulasi, kebebasan rayat dalam bersuara tidak dijamin dengan baik, pengambilan keputusan MK masih cacat. Konkreknya, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi yang kontradiktif dengan pemeliharaan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, pembagian bantuan sosial saat masa kampanye oleh pemerintah merupakan suatu politisasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara yang hingga saat ini belum jelas, dilihat sebagai bentuk otoritarianisme sebab tidak adanya konsultasi yang luas dengan masyarakat setempat dan perlemen. Pernyataan Presiden Jokowi yang mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik, input, dan potensi yang militansi dinilai kontradiktif dengan perkembangan sosial-politik dan demokrasi di masyarakat. Terdapat laporan mengenai penurunan kebebasan berserikat dan berkumpul, yang diindikasikan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Lulusnya Gibran Rakabuming Raka dalam seleksi MK saat itu dipimpin oleh ipar Jokowi, Anwar Usman, menunjukkan tidak kompetitifnya lembaga demokrasi.

Pemerintah Jokowi mendorong masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui berbagai forum dan mekanisme. Misalnya adanya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan di desa. Di sinilah peran Pers dan Media untuk menyalurkan berbagai informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Namun, terkadang pers dan media tersendiri tidak menjalankan fungsinya dengan relatif bebas. Dengan kata lain, media tidak lagi transparan tetapi telah dibeli oleh suatu elit dan untuk kepentingan tertentu saja. Dalam suatu negara demokrasi, pemerintah membuat kebijakan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kritik atau pro-kontra itu hal yang biasa dalam menanggapi suatu kebijakan. Misalnya, adanya banyak pro-kontra dengan terciptanya Omnibus Law: undang-undang cipta kerja. Namun, yang paling fatal ialah kritik terhadap pemerintah justru dikriminalisasi. Seperti yang terjadi, ada berbagai laporan bahwa terdapat beberapa forum diskusi yang dibubarkan secara paksa oleh suatu pihak tidak dikenal. Ada pula aksi demo masyarakat yang berakhir dengan luku-luka atau dipukuli oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap ruang kritik atau suara rakyat. Pemerintah Jokowi telah memberi dorongan dan kebebasan untuk bersuara entah melalui suatu forum atau dengan mekanisme tertentu tetapi pemerintah gagal untuk menjaga kebebasan masyarakat tersebut.

Paling berbahaya dalam demokrasi adalah adanya dogma yang diseludupkan dalam

kebijakan pemerintah. Dogma tersebut tentunya dicampuri oleh kepentingan personal atau kelompok. Akhirnya, kepentingan masyarakat harus dikorbankan. Seperti kebijakan pemerintah di Poco Leok sepertinya dipengaruhi oleh pihak oligarki. Akibatnya, kekerasan dari aparat keamanan merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan agar masyarakat berhenti berbicara. Atau banyak sekali pengaruh elit politik dalam mengelola tambang timika di papua juga menunjukkan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat tidak memperhatikan unsur transparansi. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya untuk kelancaran keinginan suatu pihak yang bisa disebut oligarki atau elit politik.

Fenomena krusial yang terjadi lainnya adalah terjadinya pembalikan tindakan dalam implementasi Hak Asasi Manusia. Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal fundamental dalam konsepsi negara hukum dan demokrasi. Pengaturan HAM oleh negara bukan berarti pengekanan, melainkan pengaturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Implementasi demokrasi menjadi suatu keharusan dalam negara yang berdemokrasi. Namun, yang terjadi bukan lagi pemberantasan korupsi dan penegakkan HAM, melainkan pemberantasan HAM dan penengakkan korupsi. Misalnya Anis Asrar seorang tokoh pejuang HAM yang kemudian difonis 4 tahun penjara, menunjukkan bahwa implementasi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi tidak dijalankan dengan baik.

KESIMPULAN

Berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pemerintah era Jokowi gagal untuk mempertahankan kualitas demokrasi. Hemat penulis untuk meningkatkan kualitas demokrasi maka hal yang harus diperhatikan ialah meningkatkan kembali transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah; Memperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kebebasan berekspresi masyarakat; Mengurangi praktik politik dinasti dan politik banson yang merugikan prinsip demokrasi; Memastikan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prioritas utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Salah satu yang harus diperhatikan ialah menguji etika dan intelektual politik dari calon pemimpin ke depannya. Dari analisis mengenai kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Jokowi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat berbagai aspek kunci yang menyebabkan kemunduran tersebut. Praktik politik dinasti, politik cawe-cawe, politik banson, kurangnya penegakan hukum, dan pengurangan kebebasan berekspresi adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Meskipun pemerintahan Jokowi berhasil melaksanakan pemilu dan pilkada, meningkatkan akses informasi publik, serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan bahwa pemerintahan di masa depan dapat memperbaiki kondisi demokrasi dan membangun suatu sistem yang lebih sehat dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, Muhammad. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*. Makasar: CV. Social Politik Genius [SIGN].
- Amaliya, Fadhilatul, dkk.. (2024). "Persepsi Mahasiswa Dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Joko Widodo". *Wisen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2:2.
- Aryani, Nabilla Putri, dkk.. (2023). "Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam Teori Perkembangan Filsafat Dengan Relevansi Menjelang Pemilu 2024". *Das Sollen: Jurnal Kajian Hukum dan Kontemporer dan Masyarakat* 2:1.
- Cahyati, Baiq Sidni, dkk.. (2024). "Menjadi Generasi Muju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia". *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9:1.

- Haryano, Bambang Agus, Mohamad Abduh, dan Bambang Wahyudi. (2024). "Persersi Masyarakat Pada Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020 Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada Serentak". *Jurnal Citizenship Virtues* 4:1.
- Kansil, Christine S.T. dan Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing. (2024). "Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme dan Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4:2.
- Maharani, Anindya Putri, dkk.. (2024). "Perbandingan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Singapura Menurut Klasifikasi Carol C. Gould". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2:6.
- Putri, Shella Ananda, dkk.. (2024). "Perkembangan Demokrasi di Amerika Serikat Dari Revolusi hingga Era Modern". *Jurnal Polyscopia* 1:3.
- Rahario Jati, Wasisto. (2021). "Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021". *THC INSIGHTS* no. 27.
- Rayhan, Ahmad dan Qotrum Nida. (2024). "Demokrasi Pancasila dan Penerapannya Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Literasi Hukum* 8:1.
- Razzan Hamdi, Muhammad Naufal, dkk.. (2024). "Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8:2.
- Shofa, Ghaitza Zahira, dkk.. (2024). "Kenaikan Angka Golput pada Pemilu 2024: Menurunnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih". *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 2:1.
- Wahyuni, Sylvia Ari, Sulbadana, dan Rahmat Bakri. (Juni 2024). "The Implementation of Legislation of the Regional Representative Council in the Preparation of Regional Regulation of Central Sulawesi Province of 2019-2023". *Tadulako Master Law Journal* 8:2.
- Hanwardhana, Emir. (2024, 23 september). "Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Jokowi Bilang Gini". Dalam *GNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240719202021-4-556215/indeks-demokrasi-indonesia-turun-jokowi-bilang-gini>.